

# **PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG**

**Oleh : I Nyoman Suprpta<sup>\*1</sup>**

## **Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan sawan kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya penguasaan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi proses penyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB, mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong / swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas Sosial Propinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.

Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah.

**Kata kunci : bedah rumah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan.**

<sup>\*1</sup> Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

## **1. Pendahuluan**

Salah satu langkah konkret dalam upaya mengisi kemerdekaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan melaksanakan pembangunan di segala sektor kehidupan. Pembangunan seharusnya diartikan sebagai suatu proses yang multidimensional. Keberhasilan pembangunan jangan lagi dilihat dari hasil-hasil fisik semata. Memperhatikan pembangunan dari indikator yang hanya bersifat

kuantitatif justru hanya akan menimbulkan persoalan baru bagi pembangunan itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya pengertian pembangunan ekonomi agar mengalami perubahan yang mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu, dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pembangunan juga harus dilihat secara dinamis, sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila inti pokok sasaran pembangunan berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembagian pendapatan secara adil dan merata dalam berbagai golongan masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru selama kurun waktu tiga dasa warsa telah berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, terutama hasil-hasil yang bersifat fisik seperti infrastruktur jalan raya, gedung-gedung, dan indikator kuantitatif lainnya seperti penurunan angka kemiskinan dan perkembangan sektor industri. Memperhatikan hasil pembangunan dari indikator kuantitatif dari pembangunan yang sudah berjalan ternyata memiliki banyak kelemahan.

Dalam kenyataan, berbagai masalah timbul dan berkembang sehingga melahirkan keprihatinan berbagai kalangan. Keterpurukan bangsa kita yang semula dipicu oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan karena lemahnya fundamental ekonomi kita, sehingga perekonomian nasional menjadi rentan terhadap gejolak eksternal dan internal (Chaniago, 2001 ).

Pembangunan pada prinsipnya berusaha menggarap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Masalahnya terletak pada hasil pembangunan masa lampau, dimana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Jurang si kaya dengan si miskin semakin melebar, pengangguran dan setengah pengangguran di desa maupun di kota semakin meningkat.

Timbulnya krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah mengakibatkan melonjaknya pengangguran dan peningkatan jumlah kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Krisis moneter dan ekonomi ini memang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah beserta seluruh bangsa Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk segera bisa lepas dari krisis tersebut. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menanggulangi kondisi tersebut, seperti melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dengan demikian arah dan tujuan kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik adalah bagaimana dapat mewujudkan pemberdayaan pada masyarakat (Sandiasa, 2015: 6). Juga telah pernah dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan keluarga tertinggal melalui Program Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS dan KS-1) yang dimotori oleh BKKBN, serta program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan pemberian dana secara tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Bali Mandara telah menempuh berbagai terobosan strategi untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), dan Program Bedah Rumah.

Program Bedah Rumah di Provinsi Bali dimulai sejak Tahun 2010 dan sampai sekarang masih tetap berlangsung. Bedah rumah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sebesar Rp.30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Keluarga Miskin untuk membangun rumah agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni.

Desa Jagaraga adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yang beberapa orang warganya yang masuk ketegori RTM

menerima bantuan dalam rangka program Bedah Rumah tersebut. Desa Jagaraga masih tergolong sebagai desa dengan jumlah RTM pada tahun 2018 yang cukup banyak yakni mencapai 215 RTM ( 20,79 % ) dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1034 KK. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah RTM mencapai 214 RTM dan pada tahun 2017 jumlah RTM sebanyak 214 RTM.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di Kantor Perbekel Desa Jagaraga, penerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Jagaraga pada Tahun 2018 ini berjumlah 5 ( lima ) RTM. Jumlah ini sama dengan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya masih jauh dari harapan masyarakat Desa Jagaraga, karena dengan jumlah RTM sebanyak 215, sedangkan yang mendapat bantuan program Bedah Rumah hanya 5 RTM saja, sehingga masih banyak RTM yang belum memperoleh bantuan, dan mereka harus menunggu giliran tahun berikutnya.

Permasalahan di lapangan juga muncul ketika proses penentuan RTM penerima bantuan program Bedah Rumah bersifat agak subyektif, dimana Perbekel sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan warganya yang berhak menerima bantuan tersebut terkadang pilih kasih. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusi agar tidak menjadi penyebab munculnya persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimanakah Dampak Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Arikunto (2006 : 12) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi hanya menggunakan kata-kata. Sedangkan menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Perbekel Jagaraga beserta perangkatnya, BPD, LPM, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sawan. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan program Bedah Rumah di Desa Jagaraga, yang meliputi :
  - Perencanaan : Sosialisasi dan Pengajuan Proposal
  - Pelaksanaan program Bedah Rumah : menyusun RAB, pengiriman bahan, gotong royong/swadaya, melaksanakan pembangunan, serah terima bantuan.
  - Pengawasan dan monitoring program Bedah Rumah : pelaksanaan sesuai dengan spek yang telah ditentukan, pengawasan oleh panitia bedah rumah / pendamping.
  - Evaluasi program Bedah Rumah
2. Dampak program Bedah Rumah untuk pengentasan kemiskinan di Desa Jagaraga, yang meliputi : Dampak Positif dan Dampak Negatif.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jagaraga kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan program bedah rumah dan dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan prosedur :

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi ( Sugiyono, 2013)

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga**

Program Bedah Rumah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali yang bertujuan agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria antara lain adalah masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran ), status tanah yang ditempati adalah hak milik serta rumahnya tidak layak huni.

Pengelolaan program bedah rumah melibatkan banyak stakeholder yang dalam pelaksanaannya mengacu pada tahapan-tahapan dalam manajemen yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring, serta evaluasi terhadap program bedah rumah itu sendiri.

##### **3.1.1 Perencanaan**

Pelaksanaan suatu program atau kegiatan akan berhasil dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan apabila didahului dengan proses perencanaan yang baik pula. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan ( Tjokroamidjojo, 2008: 9 ). Lebih jauh dikemukakan bahwa dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan ( *forecasting* ) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Dengan perencanaan juga dilakukan penyusunan skala prioritas terhadap berbagai alternative pilihan pekerjaan yang harus dilakukan.

Sehubungan dengan pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka proses perencanaannya dilaksanakan melalui proses pengajuan proposal dan sosialisasi kepada penerima manfaat dalam hal ini anggota masyarakat RTM yang telah disetujui untuk menerima bantuan program bedah rumah. Untuk tahun 2018 ini, pihak pemerintah Desa Jagaraga mengusulkan proposal penerima program

bedah rumah kepada Dinas Sosial Provinsi Bali sebanyak 30 ( tiga puluh ) proposal calon penerima program bedah rumah. Tetapi karena keterbatasan anggaran, maka yang disetujui cuma 5 ( lima ) RTM saja.

Dari pernyataan – pernyataan yang disampaikan oleh beberapa orang informan, yakni perbekel Desa Jagaraga dan dua orang Kelian Banjar Dinas, dapat diketahui bahwa pengelolaan bantuan program bedah rumah diawali dengan pembuatan perencanaan yang baik dengan melibatkan banyak pihak di desa yang memang dilibatkan dalam penyusunan proposal yang akan diajukan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali. Perencanaan memang sangat diperlukan untuk mengawali suatu pekerjaan agar hasilnya memuaskan semua pihak. Hal ini sesuai dengan definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Siagian ( 2010 : 21 ), yakni, perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Juga pernyataan dari Sarwoto ( 2006 : 45 ) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tahapan perencanaan dalam program bedah rumah juga dilaksanakan dengan proses sosialisasi untuk panitia program bedah rumah dan untuk penerima bantuan. Sosialisasi untuk panitia pelaksana di desa dilaksanakan pada 6 Maret 2018 bertempat di Kantor Camat Kubutambahan. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh panitia desa program bedah rumah dari desa-desa yang warganya mendapatkan bantuan program bedah rumah dari 3 ( tiga ) kecamatan yakni Kecamatan tejakula, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Sawan.

Selanjutnya sosialisasi kepada penerima bantuan program bedah rumah dilaksanakan pada 13 Maret 2018 di Kantor Camat Kubutambahan, yang dihadiri oleh seluruh warga penerima bantuan bedah rumah yang berasal dari tiga kecamatan tersebut. Sosialisasi tersebut diberikan oleh Tim dari Dinas Sosial Propinsi Bali. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada panitia dan penerima bantuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan program bedah rumah.

Dari hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi berkaitan dengan program bedah rumah, baik yang diberikan kepada panitia pelaksana program bedah rumah di desa maupun kepada warga penerima bantuan program beah rumah sangat perlu untuk dilaksanakan. Sosialisasi memang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan program bedah rumah. Dalam sosialisasi juga disampaikan perencanaan dari kegiatan tersebut. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan ( Harahap, 2010 : 9 )

### **3.1.2 Pelaksanaan**

Suatu program yang telah disusun dan direncanakan dengan baik haruslah dapat dilaksanakan dengan baik pula. Berkaitan dengan pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, semua perencanaan yang telah disusun sebelumnya segera dilaksanakan setelah diambil keputusan yang menyangkut tahapan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.

Berkaitan dengan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka hal pertama yang dilaksanakan adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya ( RAB ). RAB disusun oleh panitia pelaksana bedah rumah Desa Jagaraga yang di ketuai oleh Made Wardana.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang merupakan panitia pelaksana program bedah rumah di Desa Jagaraga, didukung dengan hasil observasi dan pengamatan terhadap dokumen yang ada, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program bedah rumah dengan aktor pelaksana yakni panitia program bedah rumah di bawah tanggung jawab Perbekel Desa Jagaraga, memang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa fasilitas tempat tinggal layak huni kepada kelompok sasaran dalam hal ini RTM. Hal ini sesuai dengan model implementasi yang ditawarkan oleh Masmanian dan Sabatier ( Abdul Wahab, 2001 : 57 ), yakni implementasi sebagai manajemen kebijakan, yang mengakui kelompok sasaran ( *target group* ) merupakan tujuan utama kebijakan, kemampuan

strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses perubahan perilaku kelompok sasaran ( *target group* ).

### **3.1.3 Pengawasan dan Monitoring**

Pengawasan dan monitoring terhadap suatu kegiatan penting dilakukan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan tersebut penting untuk dilakukan supaya pelaksanaan pengelolaan program bedah rumah tersebut bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka pengawasan dan monitoring dilaksanakan setiap hari saat proses pengerjaan bangunan rumah dilaksanakan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh panitia pengawas di desa dan oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Bali.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat hasil wawancara serta pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa pengawasan dan monitoring perlu dilakukan ketika sebuah program atau kebijakan sedang diimplementasikan (Subarsono, 2014 : 113 ). Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan dan monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan Manulang (2005) menyatakan bahwa: "Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, mengoreksi bila perlu:dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula".

### **3.1.4 Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan ( Subarsono, 2014 : 119 ). Sebagai salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Berkaitan dengan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka evaluasi terhadap pengelolaan program bedah rumah tersebut biasanya dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Sosial Provinsi Bali ketika pengerjaan bangunan bedah rumah telah selesai. Dalam hal ini untuk di Desa Jagaraga, pengerjaan proyek bedah rumah pelaksanaannya berakhir pada tanggal 31 Juli 2018. jadi Tim dari Dinas Sosial provinsi Bali baru akan melaksanakan evaluasi terhadap 5 ( lima ) unit rumah yang dibangun di Desa Jagaraga dalam rangka program bedah rumah untuk tahun 2018.

Menyimak hasil wawancara dengan beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap program bedah rumah di Desa Jagaraga sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono ( 2014 : 120 ), bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

### **3.2 Dampak Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga**

Dampak dari suatu program atau kebijakan bisa dilihat setelah kebijakan atau program tersebut selesai dilaksanakan. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi.

Sehubungan dengan pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga, maka dampak yang dapat dilihat dari adanya pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni untuk warga miskin tersebut, dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yang bisa dilihat dari adanya bantuan program bedah rumah untuk masyarakat miskin khususnya warga miskin di Desa Jagaraga, adalah dengan adanya bantuan program bedah rumah tersebut, warga miskin atau RTM yang dulunya menempati rumah yang tidak layak huni, akhirnya bisa menempati rumah layak huni.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung oleh hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa adanya bantuan program bedah rumah membawa dampak positif bagi kehidupan warga khususnya penerima bantuan program bedah rumah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh James E. Anderson ( Islamy, 2011 : 115 ), yang menyatakan bahwa dampak positif dari suatu kebijakan merupakan suatu dampak yang memang diharapkan. Sasaran kebijakan program bedah rumah yakni masyarakat miskin merupakan sasaran utama dari program tersebut. Tujuannya adalah untuk memerangi kemiskinan dan harapannya adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat tersebut. Hal tersebut memang sudah terjadi pada warga miskin di Desa Jagaraga yang selama ini telah menikmati bantuan program bedah rumah.

Di samping adanya dampak positif dari suatu program atau kebijakan, tentunya tidak bisa dipungkiri adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya program bedah rumah di Desa Jagaraga. Bantuan program bedah rumah kepada warga miskin atau RTM yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah memang lebih banyak dalam bentuk bantuan langsung. Hal ini tentunya berdampak negatif pada sikap mental warga itu sendiri.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa disamping adanya dampak positif yang memang menguntungkan warga miskin, bantuan program bedah rumah di Desa Jagaraga juga berdampak negatif pada perubahan sikap mental masyarakat yang menjadi malas, manja dan pasrah menunggu bantuan dari pemerintah. Warga bahkan terkadang menjadi tidak malu mengaku dirinya miskin dengan tujuan bisa diperhitungkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Hal ini merupakan dampak yang memang tidak diharapkan dari suatu kebijakan atau program. Seperti yang disampaikan oleh

James E.Anderson ( Islamy, 2011 : 115 ), bahwa dalam kebijakan akan muncul dampak yang diharapkan (*intended consequence* ) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended concequences* ).

Dampak-dampak dari program atau kebijakan bantuan bedah rumah seperti tersebut di atas, baru bisa diketahui setelah diadakannya evaluasi secara menyeluruh terhadap program tersebut. Untuk itulah evaluasai terhadap suatu kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui dampak yang bisa ditimbulkan oleh adanya suatu kebijakan atau program di samping bermanfaat untuk memberikan masukan agar kedepannya bisa dilaksanakan program yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono ( 2014 ), yang menyatakan bahwa tujuan evaluasi kebijakan salah satunya adalah untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Selama pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga yang berlangsung sejak tahun 2013, sampai saat ini telah tercapai 30 RTM yang telah menjadi sasaran dari program bedah rumah tersebut. Setiap tahun, Desa Jagaraga memperoleh bantuan program bedah rumah untuk 5 ( lima ) RTM, meskipun yang diusulkan selalu lebih banyak dari jumlah tersebut. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang ada, maka setiap tahunnya, Desa Jagaraga Cuma mendapatkan jatah 5 ( lima ) RTM.

#### **4.Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pemaparan dalam hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga dilaksanakan dapal beberapa tahapan yaitu perencanaan yang berupa pengajuan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan warga penerima bantuan. Selanjutnya adalah pelaksanaan berupa pengerjaan bangunan rumah yang diawali dengan menyusun RAB, pengiriman bahan-bahan bangunan, selanjutnya pengerjaan bangunan secara gotong royong atau swadaya, dimana pengerjaan bangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Pengawasan dilakukan setiap hari oleh pengawas dari desa dan 3 kali selama proses pengerjaan oleh tim dari Dinas Sosial Propinsi Bali.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengerjaan bangunan bedah rumah sudah sesuai spek yang telah ditentukan. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah.

2. Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif bagi peningkatan taraf hidup warga miskin penerima bantuan. Warga miskin akhirnya bisa menempati rumah sehat dan layak huni. Juga secara sosial dan ekonomi kehidupan mereka meningkat. Sedangkan dampak negatifnya adalah bantuan yang diberikan secara langsung seperti itu mengakibatkan masyarakat menjadi manja, malas, dan hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu merupakan dampak yang memang tidak diharapkan.

Beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil serta dampak yang lebih baik bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat khususnya warga miskin, maka pengelolaan program bedah rumah hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin dengan tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi pada tujuan utama yakni mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan program bedah rumah tersebut haruslah mereka yang benar-benar memahami permasalahan yang ada di lapangan.
2. Meskipun suatu program atau kebijakan akan selalu ada dampak positif dan dampak negatifnya, tetapi hendaknya diupayakan untuk bisa memperbesar dampak positifnya dan mengurangi dampak negatifnya. Masyarakat jangan hanya diberikan bantuan secara langsung saja, tetapi juga diberikan pemahaman bahwa bantuan tersebut hanya berupa perangsang buat mereka untuk bisa berusaha dan bekerja lebih keras lagi supaya taraf kehidupan mereka bisa meningkat dan mereka segera bisa terlepas dari jeratan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Raja Grafindo : Jakarta
- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Chaniago, Adrinof A., 2001, *Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Dinas Sosial Provinsi Bali, *Sosialisasi Pelaksanaan Bedah Rumah Tahun 2016*
- Harahap, Sofyan Safri, 2010, *Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sandiasa, 2015. "Strategi Implementasi Kebijakan Irigasiberbasis Kearifan Lokal" dalam *Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan*. Oktober 2015P.2-22. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-17637-1-4
- Sarwoto, 2006, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P., 2008, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Subarsono, AG., 2014, *Analisis Kebijakan Publik-Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta : Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2008, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung : Jakarta